

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, isu yang penting di dalam masyarakat adalah tentang lingkungan yang banyaknya tuntutan masyarakat yang sering diperoleh dari perusahaan, baik dari investor, konsumen maupun pemerintah. Tidak menutup kemungkinan, perusahaan sering tidak memperdulikan hal seperti sehingga dampaknya kondisi lingkungan perusahaan terabaikan. Tidak hanya lingkungan hidup masyarakat, lingkungan internal dalam perusahaan juga sering terabaikan oleh perusahaan salah satu contoh nyata sering terjadi demo yang dilakukan oleh karyawan itu dikarenakan tidak terpenuhinya sebuah tuntutan karyawan.

Dalam mencapai tujuan yang di inginkan perusahaan membutuhkan lingkungan internal dan lingkungan eksternal sehingga kelangsungan perusahaan tersa hidup dengan baik. Melakukan pertanggungjawaban melalui pengungkapan. *Corporate social responbilty* adalah salah satu upaya untuk mempertahankan upaya kelangsungan perusahaan. Serta untuk memperoleh nilai perusahaan yang baik sangat penting juga menerapkan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik juga.

Good corporate governance adalah komitmen, aturan main, dan praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Tim *Corporate Governance* BPKP 2003: 2) dalam Margareth, (2018: 2). *Good corporate governance* mulai dikenal di wilayah di Indonesia pada tahun 1998, pada saat terjadi krisis ekonomi yang menerpa Indonesia. Salah satu dampak buruk dari krisis ekonomi yang merpa Indonesia adalah banyaknya perusahaan yang tidak dapat bertahan dan akhirnya mengalami kebangkrutan. *Good Corporate Governance* adalah salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi politik di Indonesia pada saat itu. Menyadari hal seperti itu, pemerintah melalui Kementrian Negara BUMN memperkenalkan konsep *good corporate governance* ini dilingkungan BUMN. Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *good*

corporate governance pada Usaha Badan Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undang dan nilai-nilai etika. Margareth, (2018: 2).

Menurut FCGI (*Forum for Corporate in Indonesia*) dalam publikasinya yang mempergunakan definisi dari Cadbury Comitte dari United Kingdom tahun 1992, *corporate governance* yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang saham kepentingan intern dan kepentingan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. di samping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara lebih rinci, terminologi tata kelola perusahaan dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan kominsaris, pengurus perusahaan, dan pemegang saham. FCGI juga menyebutkan manfaat-manfaat yang akan diperoleh perusahaan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Manfaat tersebut antara lain: (1) lebih mudah untuk meningkatkan modal, (2) dapat menurunkan biaya modal, (3) meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi, dan (4) berdampak baik terhadap harga saham.

Pada dasarnya tata kelola perusahaan membahas mengenai kepentingan pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), transparansi dan penjelasan, serta peranan dewan kominsaris dan komite audit. Ana Nurdiyana, (2016: 3).

Corporate Social Responsibility merupakan wujud kesadaran perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. CSR menjadi wajib karena perusahaan tidak hanya berorientasi kepada pemilik modal (investor dan kreditor),

tetapi juga kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Edwin wijaya, (2017: 1).

Dea, Nita, dkk, (2019: 3) menyatakan dalam penelitiannya perusahaan yang dikelola secara strategis pada umumnya memiliki tujuan laba, biasanya dinyatakan dalam bentuk laba persaham. Salah satu alat terpenting untuk menilai kekuatan dari suatu perusahaan adalah analisis keuangan, akan tetapi analisis ini tidak dapat secara otomatis dapat dijadikan untuk menilai kekuatan suatu organisasi, ada pendekatan lain yang tidak kalah penting dalam meningkatkan nilai perusahaan yaitu adanya penerapan *Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan.

Langkah yang diambil untuk menghindari resiko principal dan agennya adalah dengan selalu menerapkan pendekatan *good corporate governance* dalam meningkatkan nilai suatu perusahaan.

Tuntutan paradigma *Good Corporate Governance* (GCG) dalam seluruh aktivitas perekonomian tidak dapat di elakkan lagi. Apabila kondisi GCG dapat dicapai maka di harapkan terwujudnya negara yang bersih (*clean governance*) dan terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*) serta tata kelola perusahaan yang baik. (Effendi A, 2016: 114).

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu prinsip yang mempunyai tujuan untuk mengendalikan serta mengarahkan suatu perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan suatu tanggung jawab kepada pihak-pihak yang sangat berpengaruh, yaitu pada umumnya *stakeholder* dan pada khususnya *shareholder*. Mekanisme *Good Corporate Governance* dijadikan sebagai kontrol bagi perusahaan agar tetap pada batasan yang seharusnya. Untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut maka ada beberapa indikator pendukung mekanisme diantaranya Komite audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi, dan Dewan Kominsaris, seperti pada penelitian Gayatri dan Dharma (2013) dalam Syafitri, dkk, (2018: 119) yang menyatakan bahwa mekanisme GCG diproksikan dengan menggunakan tiga variabel diatas yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap

integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan intitusional tidak memiliki pengaruh signifikan. Fahmi, Muhammad, (2016:3) mengatakan dalam penelitiannya CSR (*Corporate Social Responbilty*) adalah salah satu kinerja akuntansi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan atas usaha yang dilakukan. Pelaporan CSR di perlukan sebagai bukti tanggung jawab perusahaan.

Penelitian yang di lakukan oleh Ana Nurdiyana (2016) dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan” bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan dan pengungkapan *corporate social responbilty* (CSR) terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Burssa Efek Indonesia seperangkat mekanisme tata kelola dapat digunakan untuk mencegah adanya masalah agensi. Untuk memperoleh perhatian pasar sertaunyak berkomunikasi dengan cara *stakeholder* perusahaan menggunakan pengungkapan laporan, salah satu pengungkapan laporan, salah satu pengungkapan yang digunakan yaitu *corporate social responbilty* (tanggung jawab sosial perusahaan). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Metode purposive sampling digunakan penelitian untuk menemukan besarnya jumlah sampel penelitian, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regrensi berganda. Bukti empiris menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan mewakili pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan . Hasil temuan ini juga menunjukkan bhawa pengungkapan CSR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap niali perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengunkapkan lebih banyak CSR memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi.

Namun hal ini menjadi sebuah dilema etika yang dirasakan manajer.

M. Fahmi, (2016: 4) berdasarkan teori ekonomi klasik tugas perusahaan adalah semata-mata hanya untuk tujuan ekonomi. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan lebih luas daripada itu.

Terlebih di kondisi seperti ini (sedang pandemi) yang sekarang serba kesulitan terutama sektor perekonomian mewajibkan perusahaan di haruskan bersaing untuk menjadi lebih baik dalam segala hal dan aspek. Perusahaan-

perusahaan yang bersaing akan berlomba-lomba menunjukkan kinerja yang terbaik dari perusahaan tersebut.

Dalam mencapai tujuan yang di inginkan oleh perusahaan dibutuhkan lingkungan internal dan eksternal sehingga membuat kelangsungan perusahaan terasa hidup dengan baik. Melakukan pertanggungjawaban melalui pengungkapan *corporate governance responsibility* adalah salah satu upaya untuk memperthanakan upaya kelangsungan hidup perusahaan.

Berikut ini adalah fenomena mengenai merosotnya kinerja perusahaan terjadi perusahaan Diamond Food Indonesia khususnya dalam pendapatan menurut Richard Purwandi selaku Manager Keuangan PT tersebut mengungkapkan bahwa menurunnya kinerja ini di tandai dengan peningkatan penjualan di tenagh PSBB transisi sehingga di sektor konsumsi mengalami penurunan di saat PSBB ketat kuartal II. Sebelumnya DMD sempat mengalami kenaikan sebesar 46.49% di kuaral III tahun 201. Richard mengungkapkan per 30 September 2020 perusahaan mebukukan kenaikan aset sebesar 2% namun dengan demikian secara utuk kenaiakan tidak bisa mengimbangi penurunan penjualan. Penurunan ini menurut Richard tidak lepas karena efek COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 yang berimbas sektor pangan/konsumsi yang tidsk boleh makan di tempat. <https://stocksetup.kontan.co.id/news> di posting Rabu, 11 November 2020 07:30 WIB, dan di akses 19 Agustus 2021 22:25.

Hasil penelitian mengatakan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan *Corporate Governance Index* memiliki hubungan signifikan positif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan *Price to Book Value (PVB)*, Tobin's Q dan *Return on Asset (ROA)*. Sedangkan kualitas pelaporan keuangan yang diukur dengan *Return Quality Disclosure (RQI)* menunjukkan adanya hubungan signifikan negatif dengan semua proksi yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Nurdiana, Ana (2016: 10).

Agus Gumiwang Kartasmita (2021) selaku Menteri Perindustrian mengemukakan bahwa di tahun 2021 pada kuartal II pertumbuhan industri manufaktur cukup meningkat 6,91% hal itu tidak lain berkat dukungan dari 5 sektor industri manufaktur tersebut sehingga pertumbuhannya cukup relatif besar. 5 sektor yang mempengaruhi pertumbuhan PDB Nasional di Kuartal II-2021

adalah industri alat angkutan 1,46%, industri tekstil dan pakaian 1,05%, obat tradisional dan industri kimia farma sebesar 1,96%, industri peralatan listrik dan barang logam komputer barang elektronik optik 1,57%, dan terakhir yang cukup besar adalah industri makanan dan minuman sebesar 6,66%. Santia, Tira. Industri Manufaktur tumbuh 6,91 persen di kuartal II 2021. <https://www.liputan6.com> . akses 12 Agustus 2021, 17:57 WIB.

Kartika Wirjoatmodjo selaku Wakil Menteri BUMN II mengemukakan yang paling besar dampaknya ketika covid19 adalah BUMN, ada tiga kelompok yang sangat menurun yaitu penurunan konsumsi energi contoh BBM dan listrik yang berdampak pada PT.PLN dan PT. Pertamina, kelompok kedua adalah Pariwisata sudah jelas berdampak karena efek corona tidak bisa kemana-kemana sehingga membuat PT.Garuda dan hotel-hotel mengalami penurunan, dan yang terakhir kelompok infrastruktur terutama infrastruktur transportasi untuk mengelola jalan tol atau PT KAI, masyarakat Indonesia masih cukup sulit untuk sadar lebih baik naik angkutan transportasi umum di bandingkan menggunakan pribadi. <https://www.cnbcindonesia.com> , di posting pada: 20 Oktober 2020, 12:09 WIB dan di akses 08 Agustus 2021 00:55.

PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan GCPI (*Good Corporate Governance Perception Index*) pada tahun 2011 dengan skor 85,82% sebagai perusahaan sangat terpercaya. Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), mendesak Garuda Indonesia meningkatkan kinerja Sistem Pengendalian Internal (SPI) agar akuntabilitas perusahaan BUMN (Badan Milik Negara) ini lebih optimal. Menurut Ketua Badan Kepegawaian (BAKN) DPR Sumarjati Arjoso, setelah mendapat penjelasan dari jajaran direksi PT. Garuda Indonesia atas laporan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemerikasaan Keuangan, pihaknya mendorong Garuda Indonesia meningkatkan pelaksanaan SPI (Sistem Pengendalian Internal), sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan meningkat. Sehingga dimasa mendatang tidak terjadi lagi temuan BPK, seperti dilansir situs <http://www.dpr.go.id/> Rabu, 19 Februari 2014).

Setiap perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memkasimalkan laba yang diperoleh. Namun dalam menjalankan perusahaannya diperlukan sebuah tanggung

jawab sosila dan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sehingga perusahaan bukan saja menjadi bagian yang bertanggung jawab kepada pemiliknya saja (*shareholder*) tetapi bertanggung jawab terhadap seluruh pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan (*stakeholder*). Semakin berkembangnya suatu perusahaan maka tingkat eksploitasi sumber-sumber alam semakin tinggi dan tidak terkedali, karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Banyak perusahaan kini mengembangkan apa yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Romana Suci, (2017: 5).

Dan yang terbaru ada sejumlah emiten yang terkena masalah hukum. Misalnya ada AISA. Lalu belakangan ada Grup Lippo, diantaranya LPKR dan LPCK. Krudus emiten ini dituding tidak menerapkan GCG dengan baik, lantaran diam-diam mengalihkan kepemilikan meikarta. Salah satu investor, Irwan Ariston Napitupulu mengatakan, salah satu alasan yang menyebabkan GCB menjadi kurang baik karena adanya kepentingan tertentu. “seperti contoh kasus SMCB bberapa waktu lalu. Sahamnya naik sangat signifikan, tanpa ada berita keterbukaan apapun dari emite. Sampai akhirnya beberapa beberapa bulan kemudian, ada berita akuisisi oleh SMGR. Dan hingga saat ini saya belum melihat pihak otoritas bursa melakukan investigasi peneyelidikan transaksi untuk memeriksa adanya kemungkinan transaksi yang masuk kategori insider trading atau melakukan transaksi beli atau jual dengan memanfaatkan informasi internal perusahaan yang belum diumumkan ke publik,” jelasnya kepada kontan.co.i, Jum’at (23/11). Irwan pun bilang sebenarnya ini masuk kategori pelanggaran serius di pasar modal yang terkait GCG juga. Tapi cenderung seperti terabaika. Namun jika dilihat dri keseluruhan, Irwan menyatakan bahwa sebenarnya penerapan GCG oleh sejumlah emiten sejauh ini sudah cukup baik dan perlu terus ditingkatkan kembali. Namun ia berpendapat bahwa sebenarnya emiten yang memiliki GCG baik, tidak otomatis kinerja harga sahamnya menjadi lebih baik di pasar dibanding kinerja harga saham dari emiten yang memiliki GCG kurang begitu baik. “Idealnya, memang sebaiknya semua emiten menerapkan GCG yang baik”, paparnya. Sementara itu, Bujung malah memiliki pendapat lain. Sebagai sosok yang sudah cukup kenyang pengalaman di dunia investasisaham, ia bilang dari sekian banyak emiten yang terdaftar di BEI, ia lebih memilih untuk meembeli saham perusahaan yang

memiliki GCG yang bagus dan memberikan hasil yang baik”, jadi menurut saya kalau GCG nya tidak bagus, ya saya tidk beli, soalnya mau naik keberapa juga sahamnya,” pungkasnya. (Sumber: <https://investasi.kontan.co.id/news/tata-kelola-sejumlah-emiten-buruk-begini-kata-investor> Minggu, 25 November 2018/ 16:31 WIB)

Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi dan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020).**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
2. Apakah pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan?
3. Apakah *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan jika kedua dilakukan secara bersamaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur.
2. Mendapatkan Bukti Empiris apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* mempegaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur.
3. Pengaruh dari Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat seperti wawasan pengetahuan kepada sesama peneliti serta tambahan referensi bagi peneliti untuk mengetahui *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Penulis mengharapkan perusahaan menjadi lebih mengerti langkah atau tindakan apa yang akan diambil sehingga tidak merugikan masyarakat dan lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan.

3. Bagi Masyarakat

Penulis mengharapkan masyarakat juga mengetahui informasi terkait penelitian ini yaitu praktik tentang pengaruh nya bagaimana *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan.

4. Bagi Pemerintah

Penulis mengharapkan pemerintah lebih peka dan tegas terhadap perusahaan yang membuat peraturan-peraturan mengenai *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.